

Bab 1

## Pendahuluan

Krisis global kali ini hampir dipastikan tidak dapat diisolasi sebatas krisis keuangan, tetapi telah menjelma menjadi krisis ekonomi. Sektor ekonomi yang mengalami keruntuhan bukan hanya keuangan, namun sudah merembet ke sektor riil. Kegagalan negara mengisolasi penularan krisis dari sektor keuangan ke sektor riil merupakan kenyataan yang sangat mengecewakan. Dalam konteks ekonomi Indonesia, tentu kegagalan mencegah penularan ke sektor riil merupakan fakta yang lebih menyedihkan lagi. Kegagalan penularan tersebut umumnya bersumber dari dua sebab. *Pertama*, kebijakan melindungi perbankan dengan banyak instrumen moneter (seperti penurunan giro wajib minimum/GWM dan peningkatan jaminan deposito) ternyata tidak efektif. *Kedua*, krisis keuangan saat ini telah memasuki fase yang kedua, yaitu krisis nilai tukar (kurs). Tentu saja krisis nilai tukar tersebut makin mendekatkan krisis ini ke sektor riil karena sebagian produksi harus mendatangkan bahan baku dari luar negeri (impor).

### 1.1. Destruksi Kreatif

Peristiwa dramatis di AS sejak Juli 2007 lalu (tepat satu dekade setelah krisis ekonomi di Asia), yang ditandai oleh kasus *subprime mortgage*, merupakan rangkaian krisis panjang yang bakal mengudara ke segala arah, termasuk menuju ke Asia (tidak terkecuali Indonesia). Semakin hebat integrasi ekonomi suatu negara terhadap perekonomian global, di mana AS sebagai pemandunya, maka kian besar potensi bagi negara tersebut terkena imbas krisis keuangan AS. Problemnnya, penularan itu dimungkinkan akan lebih cepat karena ketidaksanggupan pemerintah AS untuk mengatasi persoalan krisis finansial ini. Setelah dua raksasa *mortgage* tumbang, yakni Fannie Mae dan Freddie Mac, dua minggu lalu giliran “anakonda” lembaga investasi AS juga gulung tikar, yaitu Lehman Brothers dan Merrill Lynch. Tidak cukup sampai di situ, disaat pemerintah AS belum tahu kebijakan apa yang mesti diproduksi, tiba-tiba Washington Mutual (WaMu), bank simpan pinjam terbesar di AS, bangkrut pula.

Tragedi itu sebetulnya bersumber dari keyakinan yang sudah ditanam dan dihidupkan sejak lama: ekonomi tanpa regulasi dan internasionalisasi persaingan ekonomi. Ekonomi tanpa regulasi merupakan bendera yang menjadi jualan kaum liberalis untuk meyakinkan kepada semua pengambil kebijakan ekonomi bahwa keterbelakangan ekonomi merupakan akibat praktik aktivisme negara. Inisiatif individu yang dipagari dengan beragam regulasi membuat kemampuan inovasi menjadi mati. Implikasinya, kegiatan ekonomi menjadi stagnan akibat ketiadaan insentif. Oleh karena itu, watak ekonomi “serba negara” yang antiinovasi tersebut perlu diakhiri melalui

kebebasan tanpa batas sehingga memunculkan kekuatan deskruktif yang memicu kreativitas (*creative destruction* menurut istilah Schumpeter). Munculnya lembaga keuangan/investasi di AS pada akhir abad 19 maupun awal abad 20, seperti Lehman Brothers dan Merrill Lynch, merupakan buah dari destruksi kreatif tersebut.

Sementara itu, internasionalisasi persaingan ekonomi merupakan kepercayaan lain yang tidak kalah “spektakuler”. Kaum liberalis berpandangan sangat logis: pemagaran persaingan ekonomi antarnegara berarti melindungi praktik inefisiensi ekonomi yang digeluti oleh warga/firma suatu negara. Implikasinya, konsumen (di negara yang bersangkutan) ditutup peluangnya untuk mendapatkan barang/jasa yang lebih bagus dengan harga murah. Demikian pula, produsen disuatu negara disumbat kesempatannya untuk memperoleh input atau sumber daya ekonomi lainnya (termasuk tenaga kerja) yang bermutu/murah karena pergaulan ekonomi dengan negara lain dibatasi. Singkatnya, bila seluruh praktik antipersaingan internasional itu dilangggengkan, maka inefisiensi ekonomi bakal terjadi dan kesejahteraan masyarakat sulit diciptakan. Hal ini baru dapat diterobos bila persaingan ekonomi internasional diamankan secara menyeluruh (*kaffah*).

Dua pilar ekonomi itulah yang sedikit demi sedikit dipraktikkan disemua negara, tidak terkecuali kawasan Amerika Latin dan Eropa Timur yang dulunya sangat kukuh dengan gagasan sosialisme. Dekade 1980-an merupakan titik awal dari penasbihan ide “ekonomi tanpa regulasi” tersebut dan secara cepat menjalar ke semua arah (negara). Mula-mula liberalisasi finansial dipraktikkan terlebih dulu dan baru diikuti liberalisasi

barang/jasa, di mana yang terakhir ini ditandai via ratifikasi GATT/WTO di Marakesh (Maroko) pada 1994. Namun, ketangguhan keyakinan itu tidak berumur lama, sebab kurang dari dua dekade prinsip-prinsip itu telah kehilangan pamornya. Ekonomi tanpa regulasi terbukti merupakan gagasan paling tidak kreatif yang pernah muncul dalam sejarah pemikiran ekonomi. Masalahnya bukan terletak pada logika berpikirnya, tapi kealpaannya untuk menempatkan individu sebagai makhluk multifaset.

Perilaku menyimpang individu merupakan keniscayaan yang ditinggalkan oleh kaum liberalis sehingga regulasi untuk membatasi tabiat buruk manusia tidak masuk dalam hitungan. Padahal, perilaku yang mencederai etika merupakan bagian penting dalam kasus ambruknya sektor keuangan AS saat ini. Seterusnya, kanibalisme ekonomi tidak diprediksikan akibat kepercayaan bahwa “*equal access*” akan membuat seluruh individu mendapatkan hasil yang setara. Nyatanya, kepemilikan aset dan modal lebih menentukan siapa pemenang dalam pertarungan ekonomi tanpa regulasi, sehingga ketimpangan pendapatan dan keterbelakangan di banyak negara merupakan fakta keras yang sulit dibantah. Menjadi jelas, gagasan liberalisme dianut oleh banyak pemikir bukan karena kedigdayaan bangunan teorinya, melainkan oleh sebab rapuhnya tiang-tiang ide sosialisme.

## 1.2. *Wall Street vs. Main Street*

Mahatma Gandhi sudah sejak lama merumuskan persoalan pembangunan ekonomi dalam sebuah kalimat yang bernas.

Menurutnya, “sumber daya ekonomi yang ada di bumi sangat berlimpah untuk mencukupi kebutuhan manusia, tapi jelas tidak memadai untuk memuaskan keserakahan manusia”. Jadi, keserakahan merupakan sumber masalah ketimpangan kesejahteraan dan kemiskinan yang terjadi di seantero dunia. Keserakahan menyebabkan alokasi sumber daya ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sebagian besar manusia tidak dapat mengaksesnya. Sebaliknya, sebagian kecil individu bisa menguasai sumber daya ekonomi nyaris tanpa batas, yang dengan modal itu mereka menumpuk kekayaan hingga menyentuh langit. Tidak mengherankan apabila sebagian megakorporasi di AS, Jepang, dan Eropa memiliki aset melebihi kekayaan suatu negara. Dengan kata lain, sebuah korporasi memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar ketimbang kekuatan satu negara.

Itulah yang terjadi pada korporasi kakap semacam Lehman Brothers, Merrill Lynch, Washington Mutual (WaMu), Fannie Mae, dan Freddie Mac. Perusahaan-perusahaan investasi/keuangan raksasa itu memiliki aset yang sulit dibayangkan jumlahnya. Sekadar contoh, WaMu -bank simpan pinjam terbesar di AS- memiliki aset senilai US\$ 307 miliar dan deposito sebanyak US\$ 188. Kekayaan tersebut lebih besar dari PDB Indonesia yang saat ini sekitar Rp 4300 triliun. Naasnya, perbankan yang sedemikian hebat itu luluh lantak hanya dalam hitungan hari akibat tidak tahan dengan *rush* (penarikan uang secara bersamaan dalam jumlah besar) sebagai dampak dari hilangnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan AS. Hal yang sama juga menimpa Lehman Brothers, Merrill Lynch, Fannie Mae, dan Freddie Mac. Kerakusan yang disuapi terus-menerus

menyebabkan para pengelolanya tidak berhitung atas seluruh risiko keuangan yang bakal terjadi. Bahkan, bila perlu kinerja keuangan 'dipompa' untuk memuluskan praktik keserakahan.

Celakanya, tabiat menyimpang individu itu dibiarkan secara bebas berbiak tanpa regulasi untuk mencegahnya. Kerja ekonomi dijalankan dengan basis mekanisme pasar yang mengharamkan regulasi. Prinsip liberalisasi itu didorong oleh para ekonom terkemuka di negara-negara maju (sebagian di antaranya dihadiah Nobel ekonomi), di mana AS sebagai sponsornya, agar ekonomi berjalan dengan cepat. Mereka beranggapan regulasi ekonomi cuma akan menghambat sirkulasi ekonomi sehingga akumulasi kekayaan tidak dapat dilakukan secara cepat. Sayangnya, mereka tidak sadar bahwa aset ekonomi hanya digenggam oleh sekelompok kecil individu sehingga kebebasan hanya milik mereka, sedangkan sebagian besar pelaku ekonomi lainnya justru berhadapan dalam ketidakbebasan dalam sistem ekonomi pasar. Praktik inilah yang dengan tepat dibahasakan oleh Barrack Obama dengan menyebut ekonomi AS didesain hanya untuk menafkahi kepentingan *Wall Street* (pemilik modal) dan bukan *Main Street* (tunakapital).

Dengan mudah kasus di AS bisa dibaca sebagai masalah bersama, sebab watak ekonomi yang serakah dan cuma menyantuni kepentingan segelintir pelaku ekonomi hidup di sekitar kita. Di Indonesia, kisah yang mirip juga terjadi pada medio 1997/1998 di mana segerombolan konglomerat dan pemilik perbankan memompa ekonomi secara cepat tanpa mengindahkan rambu-rambu yang dibikin. Hasrat keserakahan ditunjukkan dengan cara membuat bank dengan tujuan memberi

kredit kepada korporasi satu induk. Sebagian besar konglomerat (saat itu) punya bank dengan tugas mengucurkan ke perusahaan miliknya sendiri. Jadi, sebenarnya mereka merampok uang rakyat (nasabah) untuk diberikan ke perusahaan sendiri, tentu tanpa rambu-rambu kredit yang laik. Hasilnya, bank-bank tersebut memberikan sampai 70% total kreditnya kepada perusahaan satu induk, padahal aturan cuma membolehkan maksimal 20%. Ketika perusahaan ambruk, maka bank itu juga ikut gulung tikar.

Pada saat situasi sudah rusak, tiba-tiba negara diminta menalangi seluruh kerugian korporasi dengan dalih agar tidak terjadi pendalaman krisis. Cara pikir ini persis seperti yang dilakukan AS sekarang, di mana pemerintah AS akan menggelontorkan dana sekitar US\$ 700 miliar untuk menjamin kredit korporasi yang kolaps. Logika pikir ini tampak sangat logis, tapi jika ditelusuri sebetulnya terjadi sesat pikir yang laten. Soalnya, saat korporasi beroperasi mereka meminta negara keluar dari arena karena dianggap mengganggu proses akumulasi kapital. Tapi, begitu korporasi bangkrut, negara diminta mengongkosinya dengan memakai uang rakyat yang berasal (antara lain) dari pajak. Sistem ekonomi seperti ini mempecundangi pelaku ekonomi kebanyakan (*main street*) dalam dua hentakan sekaligus: menutup kesempatan ekonomi (karena keterbatasan modal) dan membebani biaya bila terjadi kritis. Rasanya, tidak ada peradaban (ekonomi) yang lebih brutal dari model ini.

### 1.3. Ekonomi Politik Kebijakan *Buy back*

Di luar kebijakan-kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah, terdapat satu kebijakan lain yang menarik untuk dicermati, yakni keinginan pemerintah agar BUMN melakukan *buy back* atas saham-sahamnya. Setidaknya, terdapat dua aspek yang menyebabkan hal ini menarik. *Pertama*, instrumen *buy back* dapat menjadi pintu merebut kembali saham-saham BUMN strategis yang dimiliki oleh swasta (asing). Dengan begitu, secara tidak langsung kebijakan *buy back* bisa menjadi pintu untuk memperkuat peran negara dalam perekonomian. *Kedua*, nilai *buy back* ini tidak terlalu besar (sekitar Rp 10 triliun) sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam membantu kenaikan indeks harga saham. Bahkan, dalam realisasinya, nilai *buy back* ini tidak lebih dari Rp 5 triliun. *Ketiga*, jika tidak dilakukan secara transparan, maka kebijakan *buy back* sangat rawan disalahgunakan untuk aneka kepentingan yang bersinggungan dengan korporasi maupun pusat kekuasaan.

Dalam konteks *buy back* ini pula, sebagian orang kerap mengaitkan krisis ekonomi dengan ketahanan dan kedaulatan ekonomi. Asumsinya sederhana, negara yang ketahanan dan kedaulatan ekonominya kuat dianggap akan lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Pada titik inilah kemudian isu ketahanan dan kedaulatan menjadi menu penting dalam formulasi kebijakan disaat krisis terjadi. Kebetulan dalam isu ini Indonesia menjadi salah negara yang dianggap ketahanan dan kedaulatan ekonominya rapuh. *Pertama*, privatisasi oleh sebagian kalangan dianggap sebagai cara negara maju (atau sektor privat) untuk memperlemah ekonomi negara berkembang karena sebagian firma milik negara itu berusaha di sektor yang

strategis. *Kedua*, komoditas penting (terutama di sektor pertanian) sangat tergantung dari impor. Produk-produk itu antara lain adalah jagung, kedelai, gandum, gula susu, daging, dan lain-lain. Apabila harga komoditas-komoditas tersebut melonjak di pasar dunia, maka ekonomi Indonesia pasti terguncang.

Di sinilah *buy back* menjadi penting sebab dapat menjadi mediator yang mempertemukan antara keinginan untuk mengerem laju privatisasi dan penguatan ketahanan ekonomi. Dalam soal yang terakhir ini memang tidak dimungkiri hubungan antara *buy back* dan ketahanan ekonomi agak jauh, karena variabel yang menentukan ketahanan ekonomi suatu negara sangat banyak. Tapi, sekurangnya dengan langkah ini negara sudah mulai mencicil untuk kembali memiliki usaha-usaha ekonomi strategis dan menguasai hajat publik. Sampai di sini tentu hanya saham-saham tertentu saja yang perlu diambil lagi oleh BUMN agar dana yang terbatas itu bisa menimbulkan dampak yang signifikan bagi perekonomian negara. Sedangkan untuk saham perusahaan yang tidak terlalu strategis sebaiknya ditunda terlebih dulu pembeliannya setelah nantinya pemerintah atau BUMN memiliki likuiditas yang memadai. Dengan begitu, identifikasi dan penentuan skala prioritas menjadi penting pada level ini.

Masalahnya, seberapa efektif langkah pemerintah ini dalam meningkatkan kepercayaan investor dan menyumbang kenaikan indeks harga saham? Jawaban terhadap pertanyaan ini tentu tidak bisa eksak. Namun, dengan melihat nilai kapitalisasi pasar saham yang mencapai sekitar Rp 1500 triliun (sebelum krisis), dengan mudah diambil kesimpulan bahwa upaya itu

seperti menggarami air laut. Sungguh pun begitu, jika efektivitas dilihat sebagai bentuk respons pemerintah terhadap masalah yang muncul, maka bisa jadi kebijakan *buy back* ini relevan. Bagi pelaku ekonomi, yang penting bukan besaran dana yang digelontorkan pemerintah, tapi yang lebih urgen adalah eksistensi atas inisiatif pemerintah. Di sinilah kemudian kebijakan ini mendapatkan momentumnya, karena apabila diakumulasikan dengan kebijakan lainnya (seperti penjaminan simpanan dan penurunan giro wajib minimum perbankan) nampaknya pasar sedikit lebih tenang dan nadi bursa saham kembali berdenyut.

Namun, dalam perkembangannya skema *buy back* itu tidak didasari pertimbangan teknis ekonomis itu saja. Dalam perspektif ekonomi-politik, skema tersebut mencuatkan dua gambaran. *Pertama*, dalam konteks substansial, upaya *buy back* tersebut merupakan suatu bagian yang menginginkan peran negara dalam aktivitas ekonomi kembali ditingkatkan. Soalnya, seiring dengan dieksekusinya sistem demokrasi politik di Indonesia, sistem ekonomi Indonesia menjadi sistem ekonomi pasar sehingga kesejahteraan yang adil bagi setiap penduduk sulit untuk dihadirkan secara komplet. *Kedua*, dalam konteks ekonomi-politik praktis, skema *buy back* merupakan strategi integral untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah (*incumbent*). Maksudnya, pada satu sisi imbas *buy back* tersebut dapat meningkatkan lagi kinerja bursa saham, maka pelaku pasar akan mengakui bahwa pemerintah *incumbent* sebagai regulator ulung yang dapat menjalankan peran maksimal, sehingga layak untuk dipilih kembali pada pemilihan umum tahun depan. Sedangkan di sisi lain, karena *buy back* merupakan

kontra kebijakan privatisasi yang selama pemerintahan *incumbent* juga relatif banyak dilakukan, menyebabkan upaya pembelian saham kembali tersebut menjadi modal penting untuk mereduksi opini publik dan kelompok politik nonpemerintah yang kerap menilai pemerintah sekarang menjual banyak aset negara.

Di luar soal di atas, faktor lain yang krusial dalam proses *buy back* adalah aspek transparansi. Dalam situasi di mana pergerakan harga saham turun naik sangat cepat, bahkan dalam hitungan menit, maka ketiadaan transparansi akan memunculkan peluang manipulasi (*moral hazard*). Dalam kasus pembelian saham BUMN dengan uang negara ataupun milik firma negara itu sendiri, maka aspek transparansi menjadi lebih penting lagi. Bisa dibayangkan, selisih harga Rp 100 saja/saham, maka berapa keuntungan yang dapat diraup oleh pihak-pihak yang terlibat dalam *buy back* tersebut. Oleh karena itu, dalam proses *buy back* itu terlebih dulu perlu disusun regulasi sederhana (*mini regulation*) yang memungkinkan proses transparansi tercipta. Misalnya, harga pembelian harus diumumkan begitu saham akan dibeli, sehingga publik lekas dapat mengontrol apabila terdapat indikasi penyimpangan/manipulasi. Selain itu, jangan sampai terjadi pula kebijakan *buy back* ini dibelokkan untuk kepentingan pihak lain, misalnya menyelamatkan korporasi swasta yang sedang menuju keambrokan.

#### 1.4. Kerapuhan Struktur Ekonomi

Pemerintah dan sebagian ekonom meyakini Indonesia dalam menghadapi krisis kali ini sebetulnya berada dalam posisi

yang relatif aman, karena sebagian sendi-sendi perekonomiannya cukup kokoh, misalnya dilihat dari indikator cadangan devisa, kinerja ekspor, dan nilai tukar. Lebih dari itu, pemerintah boleh optimis karena pasar modal nasional memiliki jarak persentuhan yang tidak terlalu besar ke sektor perbankan maupun sektor riil. Namun, seluruh peluru tersebut ternyata tidak banyak berguna sebagai modal "perang" melawan krisis keuangan karena adanya kombinasi dua hal: keterlambatan kebijakan pemerintah dan struktur ekonomi yang semu. Kebijakan pemerintah sejak awal tidak tegas untuk menembak sasaran, yakni melindungi perbankan dan mata uang, tetapi hanya berupa himbuan normatif yang tidak memiliki daya eksekusi. Baru pada pertengahan Oktober 2008 pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan teknis, seperti peningkatan jaminan deposito dan penurunan GWM, namun hal ini sebenarnya relatif terlambat (di samping bertabrakan dengan kebijakan lain, misalnya kenaikan BI rate yang saat ini mencapai 9,5%).

Berikutnya, kinerja ekonomi yang secara statistik cukup bagus tersebut, misalnya cadangan devisa yang mencapai mencapai US\$ 57 miliar (September 2008) dan kurs rupiah yang berada di kisaran Rp 9.400/dolar, ternyata sangat lemah menghadapi serangan psikologis yang menjangkiti pelaku ekonomi (akibat kepanikan massal). Bank Indonesia (BI) tidak dapat bertarung secara penuh untuk mengendalikan nilai tukar karena sebagian devisa sebenarnya milik (perusahaan) asing yang beroperasi di Indonesia. Jadi, dalam angka-angka statistik cadangan devisa itu milik Indonesia (BI), tapi dalam realitasnya tidak berada dalam genggaman pemerintah. Oleh karena itu,

operasi pasar yang dijalankan untuk menahan penurunan rupiah menjadi tidak optimal. Jika dibandingkan dengan Korea, Australia, dan Brasil memang penurunan rupiah masih tergolong kecil. Tapi, bila dikomparasikan dengan Singapura, Swiss, China, dan Jepang, rupiah melorot cukup tajam (Oktober 2007 - Oktober 2008) [Bloomberg, 2008].

Struktur ekonomi Indonesia itu kian rapuh apabila dicermati dari variabel-variabel makro lainnya, seperti rasio utang terhadap ekspor bersih, jumlah utang jangka pendek, dan aset luar negeri neto. Sekadar contoh, kinerja ekspor Indonesia dalam 3 tahun terakhir cukup bagus, yakni mengalami peningkatan yang fantastis sehingga menambah pundi-pundi cadangan devisa. Namun, dibandingkan dengan jumlah utang pemerintah, secara umum persentase rasio utang terhadap ekspor bersih mencapai 85%, bandingkan dengan Filipina yang sebesar (79%), Korea Selatan (51%), India (49%), Taiwan (33%), Thailand (30%), Vietnam (29%), China (25%), Malaysia (23%), Hongkong (15%), dan Singapura (6%) [EIU, IMF/Natixis; dalam Kompas, 31/10/2008]. Demikian pula, jumlah cadangan devisa Indonesia hanya lebih besar ketimbang Filipina dan Vietnam; jauh lebih kecil daripada Thailand, Hongkong, Malaysia, Singapura, Korea, Taiwan, India, apalagi China.

Situasi yang murung tersebut untungnya masih diselamatkan oleh harga minyak dan pangan yang menurun. Khusus untuk penurunan harga pangan sebenarnya menimbulkan situasi yang ambigu. Disatu sisi penurunan harga pangan memiliki efek positif karena tidak terlampaui membebani subsidi (pangan) dan cadangan devisa (akibat nilai impor pangan yang

menurun). Tapi, penurunan beberapa komoditas pertanian, seperti CPO, kakao, karet, coklat, dan lain-lain menyebabkan ekspor Indonesia melemah karena komoditas tersebut menyumbang cukup besar dalam struktur ekspor nasional. Sementara itu, penurunan harga minyak patut disambut gembira sehingga pembengkakan APBN dapat dihindari. Sayangnya, pemerintah hanya menurunkan premium sebesar Rp 500 dan itu baru berlaku pada 1 Desember 2008. Besaran angka ini sangat minimalis bila dikomparasikan dengan penurunan harga minyak yang sangat drastis. Oleh karena itu, kebijakan penurunan harga premium tersebut disangsikan dapat menstimulus pergerakan sektor riil kembali.

Begitulah, krisis ekonomi kali ini kembali memukul perekonomian Indonesia dari banyak penjuru. Celaknya, tahun 2009 merupakan saat yang tidak mudah bagi pemerintah untuk berkonsentrasi menangani krisis karena musim karnaval politik telah datang. Pada tahun depan terdapat sekurangnya dua hajatan besar, yaitu pemilihan legislatif (DPR dan DPD) dan pemilihan presiden. Bukan hanya waktu para pemangku negara yang tersita bagi hajatan politik tersebut, tapi juga konflik kepentingan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya. Inilah yang menyebabkan krisis ekonomi menjadi lebih sulit diatasi dan berjalan relatif lama. Hal lain yang perlu dicermati, struktur ekonomi Indonesia ternyata tidak sekuat yang dibayangkan, seperti yang selalu diungkapkan pemerintah. Sebagian data-data makroekonomi memang kelihatan menyilaukan, tetapi di balik angka-angka makro itu tersimpan banyak masalah yang tidak kalah mengerikan. Inilah yang juga menjadi salah satu sebab

mengapa krisis kali ini sulit dihentikan. Beberapa aspek dan keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya itulah yang menjadi telaah INDEF dalam Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI) 2009 ini. Harapannya, kajian ini bisa menjadi salah satu pembanding kebijakan bagi pemerintah untuk mengatasi problem ekonomi yang datang silih berganti. Semoga! ❶